

## ABSTRAK

Cina telah meratifikasi CEDAW semenjak tahun 1980 tetapi tetap saja banyak terjadi kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi di Cina, salah satunya adalah fenomena *bride trafficking*. Cina menempati posisi kedua sebagai negara yang paling banyak memiliki kasus perdagangan perempuan. Secara khusus dalam pasal 6 CEDAW telah mengatur juga mengenai kesepakatan bahwa setiap negara harus memberantas perdagangan perempuan. Oleh karena itu, riset ini berusaha membahas mengenai Tingkat kepatuhan Cina terhadap CEDAW. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk membahas kebijakan apa saja yang telah dilakukan Cina setelah meratifikasi CEDAW untuk memerangi *bride trafficking*. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Cina telah meratifikasi CEDAW, kepatuhan rezim terhadap implementasinya masih lemah. Diperoleh kesimpulan bahwa Cina sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW dinilai belum memiliki Kepatuhan (*Compliance*) terhadap rezim tersebut. Secara lebih jelas, menurut kategori dari Sara McLaughlin Mitchell dan Paul R. Hensel, Cina berada dalam kategori *Active* tetapi *Non-Compliance*. Cina dapat berada dalam kategori ini dikarenakan masih memberikan opsi dan pertukaran informasi tetapi kasus *bride trafficking* masih marak terjadi dan sangat mengakar di Cina. Faktor budaya, sosial, dan kemiskinan juga berkontribusi terhadap sulitnya mengatasi perdagangan pengantin di Cina. Adapun kebijakan di bawah pemerintahan Xi Jinping juga membuat Cina menjadi tidak patuh terhadap CEDAW.

**Keyword:** Cina, CEDAW, *bride trafficking*, rezim internasional, kepatuhan rezim internasional

## **ABSTRACT**

*China has ratified CEDAW since 1980 but there are still many violations against women that occur in China, one of which is the phenomenon of bride trafficking. China occupies the second position as the country with the most cases of trafficking in women. Article 6 of CEDAW specifically stipulates that every country must eradicate trafficking in women. Therefore, this research seeks to discuss China's level of compliance with CEDAW. The research method used is a qualitative method to discuss what policies China has implemented after ratifying CEDAW to combat bride trafficking. This research found that although China has ratified CEDAW, the regime's compliance with its implementation is still weak. It is concluded that China as a country that has ratified CEDAW is considered not to have Compliance with the regime. More clearly, according to the categories of Sara McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel, China is in the Active but Non-Compliance category. China can be in this category because it still provides options and exchanges information but bride trafficking cases are still rampant and deeply rooted in China. Cultural, social, and poverty factors also contribute to the difficulty of addressing the bride trade in China. The policies under the Xi Jinping administration have also made China non-compliant with CEDAW.*

**Keywords:** *China, CEDAW, bride trafficking, international regime, international regime compliance*